

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan negara Indonesia telah mengalami proses penyempurnaan sehingga berbagai aspek menjadi pusat perhatian dan penting untuk dikembangkan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan sebuah sistem pemerintahan yang baik akan menunjang kesuksesan bagi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Desa memiliki posisi penting dalam institusi pemerintahan yang menjadi fokus utama dan dianggap sebagai unit terdepan dalam menentukan proses keberhasilan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintah desa sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Digantikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang kuat dan pengakuan pemerintah untuk memberikan otonomi kepada desa. Desa diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sendiri dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan dapat banyak memberikan dampak positif, akan tetapi disisi lain juga ditakutkan akan menimbulkan pula banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapinya dengan baik konsekuensi dengan munculnya Undang-Undang tersebut. Desa bukan lagi dijadikan sebagai objek melainkan sebagai subjek untuk pembangunan yang dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat bagi penyelenggaraan pembangunan desa secara mandiri.

Sistem pemerintahan terkecil di Indonesia adalah pemerintahan desa, namun dengan demikian desa tidak dapat diabaikan karena desa memiliki peran serta tanggung jawab besar dalam menunjang suksesnya pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dengan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, kewajiban dan tugas yang diamanahkan oleh masyarakat adalah kepala desa.

Dalam pemerintahan desa mencakup kepala desa dan perangkat desa, sedangkan dalam perangkat desa mencakup sekretaris desa dan pelaksana kewilayahan. Jalannya pemerintahan desa sangat ditentukan oleh bagaimana pengelolaan keuangan desa tersebut, dengan pengelolaan yang baik dan tepat maka tingkat keberhasilan pembangunan untuk kemakmuran masyarakat akan tercapai. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelola keuangan desa.

Tujuan otonomi daerah yang digulirkan sejak masa reformasi menuntut perlunya dilakukan reformasi sektor publik dan tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya adalah mewujudkan *good governance* dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai bagian dari sektor publik dan berkaitan dengan pengelolaan anggaran, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan *good governance*. Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai setidaknya dengan tiga hal yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Pengelolaan keuangan pemerintah desa tidak terlepas dari peran akuntansi sektor publik.

Proses akuntansi yang dilaksanakan dan pelaporan yang akan disajikan menjadi tahap penting sebagai upaya pemenuhan kepentingan informasi publik. Akuntansi pemerintahan penting diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di hadapan publik. Akuntansi lingkup pemerintahan juga

perlu dilaksanakan sebagai evaluasi kinerja yang dilakukan pihak sektor publik dalam mengelola laporan keuangan dengan baik serta memberikan informasi keuangan terhadap aktivitas pengelolaan pemerintah sebagai upaya interaksi masyarakat dengan pemerintahan. Termasuk kategori terkecil dalam penilaiannya terhadap pengelolaan dana publik menjadikan akuntansi desa sebagai penerapan sektor publik yang juga perlu diperhatikan. Akuntansi sektor publik berperan penting guna untuk terciptanya *good governance*.

Solekhan (2012), menjelaskan *good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik dan bertanggung jawab, yang dijalankan secara efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan, sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Pentingnya penerapan *good governance* dalam melaksanakan pengelolaan keuangan merupakan upaya pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pada tanggal 20 Mei 2021, Chandra yang merupakan salah satu jurnalis berita media penerbit berita menyampaikan berita mengenai fakta bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum dilakukan secara efisien, efektif, atau bahkan secara disiplin. Padahal, alokasi transfer ke daerah dan dana desa telah meningkat secara signifikan dari hanya Rp 33,1 triliun pada 2000, menjadi Rp 795,5 triliun pada tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan peningkatan alokasi transfer ke daerah dan dana desa memang telah membawa dampak positif. Namun, pengelolaannya masih belum efisien. Serta masih terjadi ketimpangan kinerja fiskal antar daerah. Sri Mulyani mengemukakan, pada tahun 2019 rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB masih rendah yakni 2,65%. Sementara itu, porsi belanja pegawai masih tinggi, yaitu rata-rata 34,74%. Selain itu, porsi belanja modal masih rendah, yaitu rata-rata 20,27% dan paling rendah hanya 7,1%. Sri Mulyani juga mencatat, dana pemerintah daerah yang disimpan di perbankan masih tinggi, mencapai rata-rata Rp 100 triliun di akhir tahun. Capaian output dan outcome nasional masih rendah dan ketimpangan antar daerah masih lebar. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pemerintah desa dan partisipasi Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD) serta masyarakat sangat diperlukan dalam

melakukan pengawasan pemanfaatan anggaran dana desa yang diterima. Hal ini bertujuan agar penggunaan anggaran untuk pembangunan desa dapat dilakukan dengan tepat sasaran dan berjalan lancar.

Jalannya pemerintahan desa yang baik untuk kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertanggungjawaban dan penyusunan APBDes. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa pembangunan desa semestinya memiliki kualitas yang baik serta positif bagi masyarakat desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Desa memiliki wewenang dalam mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka desa harus menyusun APBDes.

Menurut Bastian (2006), menjelaskan bahwa *value for money* merupakan konsep yang meliputi penilaian utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. *Value for money* tidak bisa terlepas dari tiga elemen atau rasio utamanya yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang masing-masing elemen memiliki peran untuk menilai kinerja organisasi sektor publik. Ekonomi merupakan penilaian yang berkaitan dengan bagaimana desa secara tepat atau tidak dalam praktik pembelian barang atau jasa sebagai masukan yang berkualitas serta dengan harga terbaik (*spending less*). Efisiensi berkaitan dengan produktivitas dengan melakukan perbandingan *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Efektivitas berkaitan dengan tercapainya target dari suatu kebijakan atau dengan kata lain bagaimana efektivitas dari *output* dengan hasil yang capai.

Penelitian tentang kinerja keuangan desa yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti pada Magfiroh (2020), dengan metode penelitian kualitatif deskriptif menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah Desa Parengan dari elemen ekonomi pada tiga tahun anggaran yaitu pada tahun 2016 -

2018 berada pada kategori ekonomis karena berada pada persentase lebih dari 100%, sehingga dapat dikatakan semakin baik dalam meminimalisir input primer berupa anggaran untuk mencapai kegiatan. Kinerja keuangan pemerintah Desa Parengan dari elemen efisiensi pada tahun 2016 diperoleh hasil lebih dari 100%, dikatakan tidak efisien. Pemerintah Desa Parengan berupaya memperbaiki kinerja keuangan dari elemen efisiensi yang pada tahun 2017 diperoleh hasil 93,92% dan tahun 2018 yaitu 90,77% menunjukkan hasil antara 90% sampai 99% sehingga dikategorikan efisien karena realisasi pendapatan lebih tinggi dari realisasi belanja. Kinerja keuangan pemerintahan Desa Parengan dari elemen efektivitas dari tahun 2016 sampai 2018 terus mengalami kenaikan.

Sedangkan pada penelitian Sarianti dan Irama (2021), dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dari hasil perhitungan elemen efektivitas didapat hasil bahwa realisasi pendapatan Desa Kuala Bangka tahun realisasinya sudah dikatakan efektif karena sudah mencapai 100%, pada tahun 2017 100% dan 2018 realisasi pendapatan mengalami peningkatan, yaitu persentase meningkat hanya 0,4% menjadi 100,4% dan di tahun 2019 persentase meningkat menjadi 0,14% yaitu 100,18% dan dikatakan efektif. Pada elemen efisiensi didapat hasil bahwa pada tahun 2017 realisasi dikatakan tidak efisien karena lebih dari 100%, pada tahun 2018 persentase 100,71% dan 2019 realisasi anggaran mengalami penurunan, yaitu di tahun 2018 persentase menurun 0,17% menjadi 100,54% dan di tahun 2019 persentase menurun 3,9% menjadi 97,63% tetapi masih tetap dinyatakan kurang efisien.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat dilihat bahwa prinsip kinerja keuangan pemerintah desa ada yang sudah berhasil berjalan dengan baik dan ada juga yang belum dapat berjalan dengan baik dikarenakan beberapa faktor penghambat. Dalam proses pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan efektif serta efisien, hal ini dikarenakan terdapat berbagai kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa digunakan untuk membandingkan hasil dari satu periode dengan periode sebelumnya untuk

mengetahui bagaimana pengelolaan keuangannya. Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan bagian terpenting untuk pengelolaan keuangannya dalam menilai kinerja pemerintahan untuk mengelola keuangan desa (Sobaruddin, 2019).

Berdasarkan observasi awal peneliti, data APBDes tahun 2020 sampai dengan 2022 kinerja keuangan Desa Bekuan Luyang sudah terbilang cukup baik akan tetapi belum sepenuhnya. Dalam proses pembangunan Desa Bekuan Luyang memiliki faktor penunjang dan bahkan penghambat dalam proses terciptanya kinerja keuangan yang baik dan tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Peneliti tertarik menggunakan pendekatan *value for money* untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan pada pemerintah Desa Bekuan Luyang dikarenakan pendekatan ini cocok untuk melaksanakan analisis kinerja keuangan desa secara detail dan mendalam serta memberikan penjelasan yang akurat terhadap kinerja keuangan organisasi sektor publik atau pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DESA DITINJAU DARI PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PADA DESA BEKUAN LUYANG KECAMATAN KETUNGAU HULU KABUPATEN SINTANG”**.

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan mendasar dibanding penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Bekuan Luyang yaitu sesuai dengan permasalahan yang ditemui peneliti mengenai kinerja keuangan. Peneliti ingin mengkaji lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada desa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, kinerja keuangan merupakan salah satu indikasi yang utama dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan desa dalam menjalankan amanat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan desa sangat penting dilakukan guna untuk melihat tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya. Partisipasi masyarakat dalam pengamatan kinerja pemerintahan desa untuk perbaikan sistem pemerintahan desa terutama bidang keuangan yang lebih baik lagi di masa mendatang. Dalam hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menganalisis berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan desa yang diukur melalui konsep pengukuran sektor publik dengan pendekatan *value for money* yaitu meliputi ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio ekonomi?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio efektivitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menginvestigasi bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio ekonomi
2. Untuk menginvestigasi bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio efisiensi
3. Untuk menginvestigasi bagaimana kinerja keuangan pemerintah desa Bekuan Luyang ditinjau dari pendekatan *value for money* menggunakan rasio efektivitas.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis menjelaskan mengenai hasil penelitian diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang berkontribusi terhadap perkembangan teori dan penelitian terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan gambaran bagi penulis maupun pembaca mengenai analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

1.4.2 Kontribusi Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan berguna untuk menerapkan pengetahuan yang peneliti dapat selama masa perkuliahan dan untuk melaksanakan serta menyelesaikan salah satu prasyarat untuk mencapai gelar sarjana dengan program studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.

b. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai saran Desa Bekuan Luyang, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, sehingga bisa meningkatkan kualitas dan motivasi kerja terutama pada aspek kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan pada perbaikan kinerja di masa depan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai realisasi APBDes serta memberi wawasan masyarakat mengenai kinerja keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Desa Bekuan Luyang merupakan salah satu dari 29 desa yang terletak di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Desa Bekuan Luyang memiliki empat dusun yaitu Dusun Bekuan Hilir, Dusun Bekuan Hulu, Dusun Aboi Hilir dan Dusun Aboi Hulu dengan jumlah penduduk tercatat per 30 Januari 2022 sebanyak 1.410 jiwa. Berdasarkan tipologinya, Desa Bekuan Luyang diklasifikasikan sebagai desa berkembang yang memiliki sumber daya ekonomi, sosial, dan ekologi yang memadai akan tetapi kemampuan dalam pengelolaannya untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat desa masih belum maksimal, khususnya dalam sarana dan prasarana pelayanan umum dan kesehatan yang masih tergolong rendah. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah bekerja sebagai petani padi, karet, dan sawit.